



Sekda: Hanya Perlu Hati-hati

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa tak menampik dengan adanya proses proposal yang harus dilakukan penyesuaian sehingga ada perubahan.

“Penyesuaiannya ini untuk amannya pencairan hibah, bagaimana hibah ini aman dan nyaman untuk kita bersama,” katanya. Mantan Kepala Dinas Pendapatan/Pasdehan Agung Badung ini menyebutkan, perlu kehati-hatian penyaluran dana hibah. Terlebih saat ini menjadi sorotan penegak

hukum. Sehingga untuk amannya, harus ada harmonisasi proposal.

“Misal perubahan tanggal dan seterusnya,” sebutnya. Adi Arnawa menjelaskan, akan menerapkan system e-Hibah tahun 2019 untuk dapat meminimalisir temuan.

“Untuk selanjutnya mari kita melakukan perbaikan dengan mengacu pada peraturan. Proses apapun yang kemarin terjadi, kita segera selesaikan,” janjinya. (mpa)



DITUDING TAK PROFESIONAL

• KPK, BPK, Ombudsman mengingatkan Pemkab Badung soal pencairan hibah

• Pemkab Badung dianggap pencairannya tidak sesuai norma aturan



PENGAKUAN DEWAN

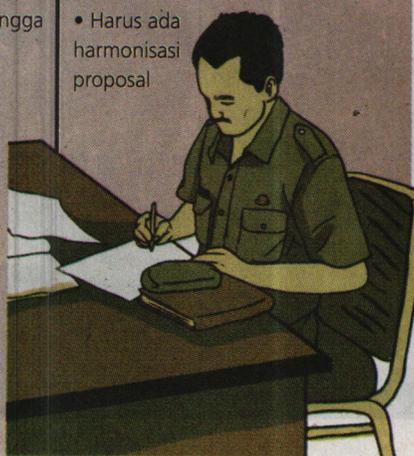
- Tidak berpola
- Prosesnya dianggap ribet
- Dilempar sana sini sehingga disebut berbelit-belit
- Pemohon hibah harus mencari pejabat yang sudah pensiun untuk tandatangan
- Proposal sudah direvisi, lagi ditelpon harus direvisi

RENCANA 2019

- Menerapkan sistem e-Hibah tahun 2019 untuk dapat meminimalisir temuan

VERSI PEMKAB

- Untuk amannya pencairan hibah
- Perlu kehati-hatian
- Harus ada harmonisasi proposal





Suyasa Pengeng Urus Hibah di Pemkab

■ DPRD Badung Nilai Pencairan Tak Berpola

MANGUPURA TRIBUN BALI - Sejumlah anggota DPRD Badung menuding Pemkab Badung tidak profesional soal hibah. Kondisi ini juga membuat pengeng alias pusing Ketua Komisi I DPRD Badung, I Wayan Suyasa. Tak heran ribetnya pola hibah di Pemkab Badung sempat jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tudingan tak profesional itu karena proses pencairan hibah di Badung tak berpola dan teknis proposal yang kurang akurat dari eksekutif. Hal ini mengakibatkan ribuan proposal kerap bolak-balik untuk dilakukan perbaikan atau revisi. Kalangan Dewan pun khawatir jika sikap jajaran eksekutif Badung ini justru akan merusak citra

ses penyaluran hibah ini memang sedikit rancu atau tidak sesuai. Palsanya prosesnya sempat dilempar sana sini sehingga disebut berbelit-belit.

Ketua Komisi III DPRD Badung, Putu Alit Yandinata juga mengaku bingung dengan sikap eksekutif. Dia mempertanyakan proposal yang diawal setelah disetujui hanya berubah pada RAB. Namun, fakta saat ini hampir semua redaksional proposal berubah. Ironisnya lagi, pemohon hibah harus mencari lagi pejabat-pejabat yang sudah pensiun dan pindah untuk menandatangani proposal tahun 2017.

"Kejadian sekarang kan proposal sudah di-

revisi, lagi ditelepon harus direvisi. Sudah direvisi lagi ada salah. Jika terus begitu (revisi) masyarakat kan bingung dan kesal juga," jelasnya.

Sebelumnya, Inspektur Badung, Luh Putu Suryaniti mengungkapkan penyaluran hibah di Badung tahun lalu dinilai KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman Republik Indonesia, dan Mabes Polri, tidak sesuai norma. Norma yang dimaksud adalah aturan yang telah diatur di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jajaran penegak hukum ini meminta agar penyaluran hibah di Badung dikembalikan pada norma yang telah diatur. (mpa)

Bupati Badung.

Ketua Komisi I DPRD Badung, I Wayan Suyasa mengatakan, hibah yang digelontorkan tersebut seharusnya bisa terealisasi dengan baik karena dibantu oleh jajaran eksekutif. Namun, selama ini pencairan hibah ini sangat tidak berpola. "Jika prosesnya ribet seperti ini kan kesian masyarakat. Nak pengeng mase dewan ne pak (sakit kepala dewan juga pak)," kata Suyasa Selasa (6/2).

Politikus Partai Golkar ini juga mengungkapkan, pro-

Edisi : Rabu, 7 Februari 2018

Hal : 6